

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perbankan Indonesia

Safitri Maharani Yusuf, S.E.I.,
Universitas Islam Indonesia
safitrimaharaniyusuf@gmail.com
Dr. D. Agus Harjito, M. Si.,
Universitas Islam Indonesia
agus_h@uii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh corporate governance terhadap pengungkapan risiko. Corporate governance dipresentasikan oleh ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan keberadaan komisaris wanita. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan Indonesia yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2016 dan pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Penelitian ini berisi gambaran besar mengenai penelitian yang akan dilakukan nantinya.

Kata kunci—*Corporate Governance, Pengungkapan Risiko, Perbankan Indonesia.*

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance to risk disclosure of Indonesian Banks. Corporate governance are identified as the size of the board of commissioners, the number of board of commissioners meetings, the composition of independent commissioners, the composition of independent audit committee members, and the presence of woman commissioners. Population in this research is Indonesian banking that listing in Bursa Efek Indonesia (BEI) in 2015-2016 and sampling in this research is done by purposive sampling method. This study contains a big picture of the research that will be done later.

Keywords—*Corporate Governance, Risk Disclosure, Indonesian Banks.*

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam perkembangan perekonomian dalam suatu negara (Ali, 2006). Selain itu, perbankan juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki risiko tinggi atau dikenal sebagai *risk taking entities* (Oorschot 2009). Dalam hal menjalankan aktivitas operasinya, perbankan lebih banyak berhubungan dengan risiko jika dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Maka diperlukan peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan *good corporate governance* sehingga bank mampu mengidentifikasi permasalahan lebih dini serta melakukan tindak lanjut yang sesuai dan lebih cepat (Bank Indonesia, 2011). Penelitian Linsey and Shirves (2006) dalam Aditya (2015) menemukan banyak persepsi mengenai risiko, ada yang memandang baik secara positif maupun negatif. Sehingga pemegang saham memerlukan informasi melalui

pengungkapan risiko untuk mengambil keputusan. keputusan dalam melakukan kegiatan bisnis serta berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko adalah *corporate governance*. Di Indonesia, telah banyak terjadi kasus bank bermasalah karena praktik perbankan yang tidak sehat yang mengesampingkan penerapan prinsip *corporate governance*. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi yang dilakukan pihak manajemen bank kepada stakeholder. Penyebab lainnya, yaitu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris selaku pengawas pelaksanaan *corporate governance* pada perbankan belum dilaksanakan dengan baik. Penerapan tata kelola perusahaan memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan informasi perusahaan (Ho & Wong, 2001; Khomsiyah, 2003).

Dalam penelitian ini *corporate governance* direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, keberadaan komisaris wanita. Ukuran dewan komisaris menunjukkan besarnya jumlah anggota yang ada pada dewan. Jumlah dewan komisaris yang besar diharapkan memunculkan perpaduan skill antar anggotanya sehingga berpengaruh terhadap kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Saidah (2014) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Menurut PBI Nomor: 8/14/PBI/2006, dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Frekuensi rapat dapat mendorong dewan komisaris untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perseroan dengan lebih intensif, relevan dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengungkapan risiko diharapkan akan lebih tinggi ketika frekuensi rapat dewan komisaris juga tinggi. Semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan (Vafeas, 2003; Brick & Chidambaran, 2007; dan Ettredge, et al, 2010).

Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komposisi komisaris independen karena keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung oleh keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris (Permatasari, 2009 dalam Suhardjanto dkk., 2012). Penelitian oleh Probohudono et al., (2013) menghasilkan penelitian bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap pengungkapan risiko. Selain itu, variabel komposisi komite audit independen juga memiliki pengaruh terhadap pengungkapan risiko. Penelitian dilakukan oleh Nasution & Setiawan (2007) yang mengungkapkannya bahwa semakin independen komite audit, diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko.

Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan dewan direksi menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa ada diskriminasi. Penelitian yang dilakukan Ntim et al. (2013), Allini et al. (2016) dan Al-Maghzom et al. (2016) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Keberadaan wanita sebagai Dewan Komisaris dapat berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan strategis untuk pengungkapan risiko.

Penelitian serupa mengenai hubungan *corporate governance* dan pengungkapan risiko perusahaan sudah dilakukan oleh Suhardjanto dkk. (2012), Ntim et al. (2013), Allini et al. (2016) dan Al-Maghzom et al. (2016), Ho dan Wong (2001), Abraham dan Cox (2007), dan Khomsiyah (2003). Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan objek perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2015-2016.

KAJIAN TEORI

Perbankan

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam menyelaraskan, menyeraskan, serta menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Pengertian Bank Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 mengenai perubahan undang-

undang Nomor 7 tahun 1997 tentang perbankan, menyebutkan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank menurut IAI dalam PSAK Nomor 31 Standar Akuntansi Keuangan (2004) adalah: “Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Pengungkapan Risiko

Salah satu aspek penting di dalam pengelolaan risiko adalah pelaporan risiko atau pengungkapan risiko dalam laporan tahunan. Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting dalam pelaporan keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktek akuntansi dan investasi (ICAEW, 2002). Manfaat pengungkapan risiko menurut Taures (2011), yaitu a) Untuk memperbaiki image perusahaan dan memberi informasi kepada stakeholder mengenai kemampuan manajerial perusahaan dalam mengelola risiko. b) Dapat membantu menentukan profil risiko perusahaan, estimasi nilai pasar, dan akurasi ramalan harga sekuritas bagi investor. c) Mengurangi asimetri informasi antara manajer dan investor serta untuk mengurangi biaya pendanaan eksternal perusahaan.

Corporate Governance

Menurut Organization for Economic Corporation and Development (OECD, 2004), *corporate governance* adalah suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan serta untuk menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Struktur dari *corporate governance* menjelaskan mengenai distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholder. Asas tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris menunjukkan besarnya jumlah anggota yang ada pada dewan. Dewan yang memiliki ukuran besar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan direktur yang memiliki kompetensi, artinya ukuran dewan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Akra et al., (2010) dan Abraham dan Cox (2007) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko. Selain itu, Suhardjanto dkk. (2012) juga menemukan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris secara potensial merupakan peristiwa penting dalam manajemen sebuah perusahaan dan juga dapat dijadikan forum untuk menghindari asimetri informasi tentang kondisi perusahaan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Oleh karena itu, pengungkapan risiko diharapkan akan lebih tinggi ketika frekuensi rapat dewan komisaris juga tinggi. Suhardjanto dkk. (2012) yang menemukan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

Komposisi Komisaris Independen

Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen (Suhardjanto dkk., 2012). Perusahaan dengan tingkat proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung akan dituntut untuk memberikan informasi lebih banyak demi menyeimbangkan tingkat risiko reputasi pribadi mereka. Penelitian oleh Abraham dan Cox (2007), Baek et al., (2009), dan Probohudono et al., (2013) menghasilkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap pengungkapan risiko.

Komposisi Komite Audit Independen

Keberadaan komite audit independen meningkatkan kualitas kontrol terhadap aktivitas perusahaan (Forker, 1992), termasuk fungsinya dalam meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Collier, 1993). Nasution & Setiawan (2007), Li, et al. (2008), dan Cety & Suhardjanto (2010) mengungkapkan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, termasuk dalam pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit, diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan risiko. Penelitian oleh Suhardjanto dkk. (2012) menemukan proporsi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko.

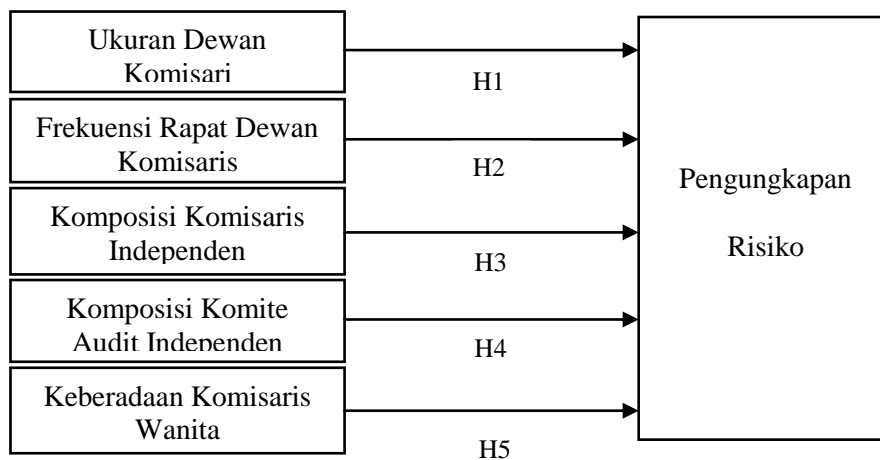
Keberadaan Komisaris Wanita

Wanita pada umumnya cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih seksama (Robbins dan Judge, 2008 dalam Suherman, 2017). Adams dan Ferreira (2004) menyatakan bahwa anggota dewan komisaris yang terdiri dari komisaris laki-laki dan wanita lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Penelitian yang dilakukan Ntim et al. (2013), Allini et al. (2016) dan Al-Maghzom et al. (2016) memperoleh hasil bahwa dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan risiko.

Pengembangan Hipotesis

- H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.
- H2: Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.
- H3: Komposisi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.
- H4: Komposisi Komite Audit Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.
- H5: Keberadaan Komisaris Wanita berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Risiko.

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan harus terdaftar selama tahun 2007 hingga 2009 dan tidak mengalami delisting serta laporan keuangan yang diterbitkan memuat unsur-unsur variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu, perbankan melakukan IPO maksimal pada tahun 2014. Berdasarkan kriteria tersebut, dari 84 populasi, diperoleh jumlah sampel sebanyak 80 laporan keuangan perbankan yang memenuhi kriteria.

Data dan Metoda Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2016. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari situs www.idx.co.id dan dari situs masing-masing perusahaan sampel.

Definisi Operasional

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris direpresentasikan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan (independen) sesuai dengan penelitian Dalton et al (1999), Nasution dan Setiawan (2007) dan Abeysekera (2008).

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Brick & Chidambaran (2007) dan Ettredge, et al. (2010) yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun.

3. Komposisi Komisaris Independen

Komisaris independen diukur dengan persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Abeysekera (2008), Permatasari (2009) dan Ettredge, et al. (2010), sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

4. Komposisi Komite Audit Independen

Indikator yang digunakan adalah persentase anggota komite audit yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran komite audit perusahaan sesuai dengan penelitian Nasution & Setiawan (2007), Li, et al. (2008), dan Cety & Suhardjanto (2010), sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Komite Audit Independen}}{\sum \text{Komite Audit}} \times 100\%$$

5. Keberadaan Komisaris Wanita

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Al-Maghzom et al. (2016), skor 1 diberikan jika terdapat dewan komisaris wanita dan skor 0 diberikan jika tidak terdapat dewan komisaris wanita.

6. Pengungkapan Risiko

Metoda analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (*content analysis*). Metoda ini dipilih karena penelitian memfokuskan pada jumlah atau banyaknya pengungkapan risiko, bukan pada kualitas pengungkapan risiko itu sendiri. Teknik ini memungkinkan suatu replikasi dan kesimpulan yang valid dari data berdasarkan konteks. Untuk meyakinkan cara replikasi kesimpulan, seperangkat instrument pemeriksaan, daftar nama (*check list*), dan aturan keputusan dibuat. *Checklist* dilakukan dengan melihat adanya pengungkapan risiko dan manajemen risiko yang terangkum dalam enam kategori risiko utama yaitu: *financial risk*, *operation risk*, *empowerment risk*, *information processing and technology risk*, *integrity risk*, and *strategic risk*. Enam kategori tersebut terbagi dalam 37 item pengungkapan, seperti yang tercantum di bawah ini (Linsley and Shriver, 2006):

<i>Financial risk</i>	<p>a. <i>Interest rate</i></p> <p>b. <i>Exchange rate</i></p> <p>c. <i>Commodity</i></p> <p>d. <i>Liquidity</i></p>
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	e. <i>Credit</i>
<i>Operational risk</i>	a. <i>Customer satisfaction</i> b. <i>Product development</i> c. <i>Efficiency and performance</i> d. <i>Sourcing</i> e. <i>Stock obsolescence</i> f. <i>Product and service failure</i> g. <i>Environmental</i> h. <i>Health and safety</i> i. <i>Brand name erosion</i>
<i>Empowerment risk</i>	a. <i>Leadership and management</i> b. <i>Outsourcing</i> c. <i>Performance incentives</i> d. <i>Change readiness</i> e. <i>Communications</i>
<i>Information processing and technology risk</i>	a. <i>Integrity</i> b. <i>Access</i> c. <i>Availability</i> d. <i>Infrastructure</i>
<i>Integrity risk</i>	a. <i>Management and employee fraud</i> b. <i>Illegal acts</i> c. <i>Reputation</i>
<i>Strategic risk</i>	a. <i>Environmental scan</i> b. <i>Industry</i> c. <i>Business portfolio</i> d. <i>Competitors</i> e. <i>Pricing</i> f. <i>Valuation</i> g. <i>Planning</i> h. <i>Life cycle</i> i. <i>Performance measurement</i> j. <i>Regulatory</i> k. <i>Sovereign and political</i>

Dalam penelitian ini, pengindentifikasian informasi risiko dilakukan dengan memberikan nilai 1 jika ada kalimat yang merepresentasikan adanya pengungkapan risiko sesuai dengan kategori yang digunakan, dan 0 jika tidak ada kalimat yang menunjukkan pengungkapan risiko. Formula yang digunakan dalam menghitung pengungkapan risiko adalah:

$$\text{Indeks Pengungkapan Risiko} = \frac{\text{Jumlah Item yang Diungkap}}{\text{Jumlah Maksimum Item yang Diungkap (= 37)}}$$

Pengujian Hipotesis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) untuk menggambarkan variabel-variabel penelilitian.

2. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menunjukkan bahwa data yang ada terdistribusi secara normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini dilakukan dengan menguji nilai residual dari persamaan regresi. Jika signifikan pada nilai Kolmogorov-Smirnov $< 0,05$ maka H_0 ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikansi pada nilai Kolmogorov-Smirnov $> 0,05$, maka H_0 diterima, sehingga data terdistribusi secara normal (Ghozali, 2011: 164).

b. Uji Multikolonieritas. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, Variance Inflation Factor (VIF), multikolonieritas terjadi jika nilai tolerance $\leq 0,10$, atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Park. Dasar pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai signifikansi dalam tabel *coefficient* $< 0,05$ maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Apabila sebaliknya nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

3. Analisis Regresi Berganda

Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah

$$PR = \alpha_1 + \beta_1UDK + \beta_2FRDK + \beta_3KKI + \beta_4KKAI + \beta_5KKW + \varepsilon$$

Keterangan:

PR = Pengungkapan Risiko

UDK = Ukuran Dewan Komisaris

FRDK = Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

KKI = Komposisi Komisaris Independen

KKAI = Komposisi Komite Audit Independen

KKW = Keberadaan Komisaris Wanita

ε = Error

4. Uji Hipotesis

a. Uji F (F-Test)

Uji F adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan dapat memengaruhi variabel dependen (Algifari, 1997).

b. Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilainya adalah antara nol dan satu. Nilai (R²) yang kecil berarti kemampuan variabel dependen sangat terbatas.

c. Uji T (t-test)

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki kontribusi secara parsial terhadap variabel dependen.

KESIMPULAN

Hasil penelitian belum bisa dipresentasikan dikarenakan peneliti sedang dalam tahap pengolahan data. Penelitian ini merupakan gambaran besar mengenai penelitian yang sedang dilakukan dan sudah melalui tahap seminar proposal.

SARAN

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memasukkan lebih banyak variabel yang dapat merepresentasikan *corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. (2010). The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11 (4)., 504-518.
- Abraham, S., & Cox, P. (2007). Analysing The Determinants of Narrative Risk Information In UK FTSE 100 Annual Reports. *The British Accounting Review*, 227–248.
- Adams, R., & Ferreira, D. (2004, November). *Gender Diversity in the Boardroom*. Dipetik April 21, 2018, dari [pdfs.semanticscholar.org: https://pdfs.semanticscholar.org/bfc1/02d254103620d1d24d59c86f465c1398800f.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/bfc1/02d254103620d1d24d59c86f465c1398800f.pdf)
- Aditya, H., & Meiranto, W. (2015). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Risk Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 4, Nomor 4*, 1-10.
- Al-Akra, M., Eddie , I., & Ali , M. J. (2010). The influence of the introduction of accounting disclosure regulation on mandatory disclosure compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review*, 170–186.
- Ali, M. (2006). *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Allini, A., Rossi, F. M., & Hussainey, K. (2016). The Board's Role in Risk Disclosure: an Exploratory Study of Italian Listed State-Owned Enterprises. *Public Money and Management*, 113-120.
- Al-Maghzom, A., Hussainey, K., & Aly, D. (2016). Corporate Governance and Risk Disclosure: Evidence From Saudi Arabia. *Corporate Ownership and Control Journal Vol. 13, Issue 2.*, 145-166.
- Baek, H., Johnson, D., & Kim, J. (2009). Managerial Ownership, Corporate Governance, and Voluntary Disclosure. *Journal of Business & Economic Studies*, Vol. 15 Issue 2, 44-61.
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

- Brick, I. E., & Chidambaran, N. (2007, November). *Board Meetings, Committee Structure, and Firm Performance*. Dipetik April 6, 2018, dari researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/227413681_Board_meetings_committee_structure_and_firm_value
- Cety, T., & D., S. (2010). Pengaruh Corporate Terhadap Environmental Performance di Indonesia. *Call for Paper*. Solo: Call for Paper FE UNS.
- Collier, P. (1993). Factors Affecting The Formation of Audit Committees in Major UK Listed Companies. *Accounting and Business Research Vol. 23*, 421-430.
- Dalton, D., Daily, C., Johnson, J., & Ellstrand, A. (1999). Number of Directors and Financial Performance: A Meta-Analysis. *Academy of Management Journal 42 (6)*, 674-686.
- Ettredge, M., Johnstone, K., Stone, M., & Wang, Q. (2010). The Effects of Company Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. *Review of Accounting Studies*, 866–889.
- Forker, J. (1992). Corporate Governance and Disclosure Quality. *Accounting and Business Research. Vol. 22*, 111-124.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ho, S. S., & Wong, K. S. (2001). A Study of Relationship between Corporate Governance Structure and Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 139–156.
- ICAEW. (2002). *Reporting Business Risks: Meeting Expectations*. London. Dipetik Februari 18, 2018, dari icaew.com: <https://www.icaew.com>
- Khomsiyah. (2003). Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Li, J., Pike, R., & Roszaini, H. (2008). Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, 137-159.
- Linsley, P. M., & Shrives, P. J. (2016). Risk Reporting: A Study of Pengungkapan risikos in the Annual Reports of UK Companies. *The British Accounting Review*, 387-404.
- Nasution, M., & Setiawan, D. (Juli 2007). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Ntim, C. G., Lindop, S., & Thomas, D. A. (2013). Corporate Governance and Risk Reporting in South Africa: a Study of Corporate Risk Disclosures in The Pre- and Post-2007/2008 Global Financial Crisis Period. *International Review of Financial Analysis 30*, 363-383.
- OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Dipetik Februari 18, 2018, dari oecd.org: <http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf>
- Oorschot, L. v. (2010). *Risk Reporting: An Analysis of the German Banking Industry*. Dipetik April 6, 2018, dari repub.eur.nl: https://repub.eur.nl/pub/20027/157-175_oorschot.pdf

- Probohudono, A. N., Tower, G., & Rusmin, R. (2013). Risk Disclosure During The Global Financial. *Social Responsibility Journal Vol. 9 No. 1 2013*, 124-136.
- Saidah, S. (2013). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2011). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Suhardjanto, D., & Dewi, A. (2011). Pengungkapan Risiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 105-118.
- Suhardjanto, D., & Rahmawati, E. (2012). Peran Board of Directors dalam Operational Risk Disclosure: Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Trikonomika Volume 11, No. 1.*, 1-14.
- Suhardjanto, D., Dewi, A., Rahmawati, E., & M, F. (2012). Peran Corporate Governance Dalam Praktik Pengungkapan risiko Pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 1-96.
- Suherman. (2017). Pengaruh CEO Wanita Terhadap Cash Holding Perusahaan. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume VII, No. 1.*, 48-58.
- Taures, N. S. (2011). *Analisis Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan Dengan Pengungkapan Risiko (Studi empiris pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI tahun 2009)*. Dipetik Februari 18, 2018, dari eprints.undip.ac.id: <http://eprints.undip.ac.id>
- Vafeas, N. (2003). *Futher Evidence on Compensation Committee Composition as A Determinant of CEO Compensation*. Dipetik April 6, 2018, dari [jstor.org](http://www.jstor.org/stable/3666336): <https://www.jstor.org/stable/3666336>